

Perluakah Indonesia Memiliki Aturan Debt to Equity Ratio (DER)

DR.AZIZ SYAMSUDDIN

Latar Belakang

- Pada masa Orde Lama bangsa Indonesia belum menentukan sistem pembangunan ekonomi, karena masih disibukkan dalam hal pembangunan negara secara konstitusional (*nation building*), akan tetapi dalam sambutan pidato Presiden Soekarno yang selalu ia dengung-dengungkan yang kita kenal dengan Nawaksara (22 Juni 1966) adalah tentang system kemandirian ekonomi (*self reliance*).
- Arah perekonomian mulai bertendensi ke arah sistem Sosialisme
- Pada era orde baru, sistem ekonomi mulai digodok yang mana visi Indonesia pada waktu itu lebih condong pada sistem Kapitalisme

- Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.
- Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
- Pada era Orde Baru, konsep pembangunan diupayakan lewat strategi industrialisasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai basisnya.
- Perkembangan industri Indonesia ini tak lepas dari kucuran dana dalam jumlah besar dari negara-negara maju lewat Utang Luar Negeri (ULN) dan penanaman modal asing (PMA).

- kapital dari negara-negara maju cenderung beranak-pinak di negara berkembang, tetapi akan segera mengalir kembali ke negara maju. (A.Lucas)
- pembangunan ekonomi tidak dapat dinikmati semua rakyat Indonesia di setiap provinsi. pertumbuhan tanpa pemerataan' (*growth without equality*).
- Data BPS menunjukkan nilai Indonesia dari 2010 yang 0,3% meningkat menjadi 0,4% pada 2011 menunjukkan ketimpangan pendapatan antar kelas.
- Ditahun 2015 turunnya mata uang juga menjadi kendala didalam mencapai tujuan kesejahteraan, membengkaknya hutang luar.

- rasio discounted cash flow dengan model persamaan :

$$DCF = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

CF = Cash Flow

r = discount rate (WACC)

- adalah r (discount rate) yang merepresentasikan tidak hanya nilai suku bunga akan tetapi juga bentuk representasi dari resiko seperti ketidakpastian peraturan atau peraturan yang selalu berubah ubah

Pajak dan Debt to Equity Ratio (DER)

- pada akhir tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 686,274 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai sebesar $\pm 51\%$.
- Didalam nota keuangan APBN tahun 2016 pendapatan perpajakan Rp. 1.565.784 triliun naik sebesar 14,5 persen dari perkiraan realisasi pajak di tahun 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.

- rasio hutang atas modal adalah 4:1 akan tetapi peraturan ini tidak berlaku bagi beberapa bidang usaha seperti Perbankan, asuransi dan minyak dan gas
- Penerapan peraturan ini sangat baik jika dilakukan pada kondisi ekonomi yang positif dikarenakan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang baik peraturan ini akan mampu menjaga nilai mata uang.
- ekonomi Indonesia belum berada diposisi yang baik dan penerapan peraturan ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi.
- Debt to equity ratio di dalam ketidak seimbangan pasar modal yang terjadi saat ini dikhawatirkan akan membuat pelaku pelaku ekonomi menarik diri dan menunggu (*wait and see*), terlebih didalam kondisi ini dikhawatirkan juga bahwa pelaku ekonomi memang membutuhkan modal lebih untuk usahanya dapat bertahan.
-

PENUTUP

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 169/PMK.010/2015 adalah kebijakan yang brilian untuk dilakukan, akan tetapi ada baiknya jika peraturan ini ditunda terlebih dahulu dan pemerintah lebih memfokuskan mengoptimisasi pendapatan pajak yang ada pada tahun ini, melakukan kebijakan-kebijakan guna menjaga ketahanan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan pasar, dan diharapkan agar Indonesia segera terbebas dari keadaan ekonomi yang tidak baik.